

## Laporan Kegiatan Seminar Nasional *Penguatan Kelembagaan Demokrasi*

Kerjasama AIPI dan Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga  
Gedung Balairung UKSW, Salatiga, tanggal 31 Juli 2018



Foto bersama sebelum mulai seminar

Seminar nasional ini diadakan sebagai salah satu bentuk kepedulian AIPI, khususnya dalam Komisi Kebudayaan. AIPI merasa perlu mengangkat tema tentang demokrasi di Indonesia mengingat akhir-akhir ini perkembangan demokrasi mengalami defisit dan ruang demokrasi dicemari oleh sejumlah aksi intoleran dan tindak kekerasan dalam berbagai bentuk, seperti *hate speech*, hoaks dan bahkan aksi teror di berbagai tempat.



Prof. Dr. Amin Abdullah mewakili Ketua AIPI membuka seminar

Sejumlah faktor ditengarai sebagai penyebab kemunduran demokrasi. Di antaranya, ketidakhadiran negara dan lemahnya penegakan hukum sehingga terjadi korupsi, penyalahgunaan wewenang, impunitas serta berbagai bentuk kekerasan dan kriminalitas

yang berujung pada ketimpangan sosial yang begitu kasat mata. Faktor lain, buruknya kinerja ekonomi dan pelayanan publik sehingga melahirkan kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial. Faktor lain lagi yang juga tidak kurang pentingnya adalah konflik dan ketegangan etnik dan religius; sistem akuntabilitas dan institusi politik yang lemah dan tidak efektif.

Tentu penyelenggaraan demokrasi bukan semata untuk demokrasi, tetapi demokrasi untuk *good life*. Demokrasi harus berujung pada kesejahteraan, kemashlahatan dan kedamaian seluruh anggota masyarakat, tanpa kecuali. Apa yang menjadi cita-cita Indonesia seperti tertera pada Pembukaan UUD 1945 harus dicapai dengan jalan demokrasi yang bukan sekedar masalah kebebasan dan prosedur, melainkan substansial.



**Rektor UKSW, Dr. Neil Samuel Rupidara memberikan sambutan**

Tujuan kegiatan seminar adalah: 1) Menggali masalah-masalah krusial yang dihadapi negara dalam upaya pengembangan demokrasi substansial berdasarkan etika demokrasi dan nilai-nilai keadaban; 2) Memetakan hambatan dan peluang dalam penegakan demokrasi, terutama di aras lokal di Indonesia; 3) Merumuskan rekomendasi konkret dan operasional bagi upaya penguatan kultur demokrasi dengan menekankan pada nilai-nilai keadaban berdasarkan Pancasila, Konstitusi dan prinsip HAM. Sebagai sebuah institusi yang bersipat nonstruktural, AIPI berkewajiban menyampaikan masukan pemikiran kepada pemerintah terkait pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya pengembangan demokrasi di Indonesia. Dalam setiap kegiatan AIPI selalu mengajak perguruan tinggi, dan kali ini AIPI menggandeng UKSW, Salatiga.

Seminar dibuka Ketua AIPI yang diwakili Ketua Komisi Kebudayaan, Prof. Dr. Amin Abdullah. Lalu diikuti sambutan Rektor UKSW, Dr. Neil Samuel Rupidara. Para pembicara terdiri dari Dr. Saiful Mujani dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Prof. Dr. Syarif Hidayat dari LIPI, Prof. Dr. Tonny Pariela dari Universitas Pattimura, Ambon, Dr. Abdul Malik Gismar dari Universitas Paramadina, Jakarta dan Dr. Pamerdi Giri Wiloso, dari UKSW, Salatiga. Dilengkapi dengan dua moderator: Prof. Dr. Musdah Mulia dari AIPI dan Dr. Ishak Lattu dari UKSW.



**Musdah Mulia selaku moderator seminar memberikan pengantar diskusi**

Seminar dibuka oleh Ketua AIPI yang diwakili oleh Ketua Komisi Kebudayaan, Prof. Dr. Amin Abdullah. Sambutan oleh Rektor UKSW, Dr. Neil Samuel Rupidara. Para pembicara terdiri dari Dr. Saiful Mujani dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Prof. Dr. Syarif Hidayat dari LIPI, Prof. Dr. Tonny Pariela dari Universitas Pattimura, Ambon, Dr. Abdul Malik Gismar dari Universitas Paramadina, Jakarta dan Dr. Pamerdi Giri Wiloso, UKSW, Salatiga. Dilengkapi dengan dua moderator: Prof. Dr. Musdah Mulia dari AIPI dan Dr. Ishak Lattu dari UKSW.

Seminar menyimpulkan antara lain, pertumbuhan demokrasi Indonesia akhir-akhir ini (sejak 2006) cenderung menurun, bahkan dalam banyak aspek mengalami defisit demokrasi. Istilah lain yang muncul dalam seminar adalah demokrasi transaksional, demokrasi simbolik atau demokrasi prosedural karena hanya mementingkan aspek-aspek yang bersipat prosedural, seperti terlaksananya proses Pemilu dan Pilkada. Kondisi yang memprihatinkan ini jika tidak dikelola dengan baik, Indonesia dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam bentuk demokrasi ilusif, hanya seolah-olah demokrasi.



**Bertukar cendera mata AIPI dan UKSW**

Salah satu indikator menurunnya demokrasi di Indonesia adalah menguatnya intoleransi. Fatalnya, intoleransi terjadi bukan hanya di kalangan masyarakat yang tidak terpelajar, melainkan juga di kalangan profesional dan berpendidikan tinggi. Lebih fatal lagi, bahwa secara konstitusional, pendidikan kita yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila justru mengandung nilai-nilai intoleran, antara lain intoleran terhadap ideologi komunis.

Bagaimana pun demokrasi tetap harus menyediakan ruang bagi individu atau kelompok atau organisasi yang mempromosikan pandangan eksklusif atau bahkan anti demokrasi. Artinya, meski membawa ancaman laten terhadap demokrasi, namun prinsip demokrasi tidak memperbolehkan adanya perlakuan semena-mena terhadap kelompok berbeda. Karena itu, tantangan besarnya adalah bagaimana masyarakat tetap bersikap demokratis menghadapi kelompok-kelompok yang mengusung agenda eksklusif atau anti-demokrasi.



**Pemberian sertifikat kepada narasumber dan moderator**

Di samping itu, pertumbuhan demokrasi juga tidak sinkron dengan pertumbuhan *good governance*. Kondisi tersebut terlihat dari maraknya korupsi, masih tingginya angka kemiskinan dan masih lebarnya kesenjangan sosial di masyarakat. Selain itu, tingginya partisipasi publik bukan jaminan dari membaiknya kualitas demokrasi.

Masalah lain adalah agenda reformasi lebih banyak diarahkan untuk reformasi kelembagaan, misalnya dengan amandemen UUD, perbaikan prosedur penyelenggaraan Pilpres, Pilkada dan seterusnya. Hal yang diprioritaskan hanyalah institusi, bukan esensi lembaga. Dengan ungkapan lain, arah demokrasi lebih mengedepankan perbaikan *state institutional*, bukan *state capacity*. Tidak heran jika yang ditonjolkan hanyalah pencitraan bukan kualitas dan kapasitas institusi demokrasi. Demokrasi baru sebatas menghasilkan *vote* belum mampu mengubah *vote* menjadi *voice* yang bermakna bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Laporan Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2006 juga mengkonfirmasi potrem buram demokrasi tersebut. IDI, antara lain melaporkan aspek *civil liberties* cenderung membaik, namun aspek kelembagaan politik mengalami stagnasi, belum terlihat sinyal pertumbuhan yang memuaskan. Kondisi ini diperparah pula oleh buruknya representasi



lembaga demokrasi, seperti lembaga birokrasi, legislatif, peradilan, dan yang paling memprihatinkan adalah partai politik. Institusi ini cenderung oligarki dan tidak banyak memproduksi kader-kader handal karena minimnya proses kaderisasi. Institusi politik memburuk umumnya disebabkan oleh kinerja partai politik yang belum transparan dan masih sentralistik. Disarankan agar terhadap partai politik juga dilakukan proses desentralisasi dan akreditasi seperti halnya institusi lain.



**Seminar dimeriahkan dengan tarian Papua dan persembahan band mahasiswa UKSW**

Potret buram demokrasi juga diafirmasi oleh buruknya praktek demokrasi di aras lokal. Hal ini dinarasikan dengan baik oleh kedua narasumber, masing-masing mewakili bagian Timur, yakni Maluku dan bagian Barat, yakni Jawa. Menurut mereka praktek demokrasi di aras lokal masih diwarnai oleh proses-proses transaksional. Masyarakat sipil memang tumbuh, tetapi tidak disertai dengan tumbuhnya nilai-nilai keadaban (*virtual values*), kepatuhan pada hukum, ketertiban sosial dan keberadaban masyarakat. Kebebasan sipil yang dijamin konstitusi kurang bermakna bagi kelompok-kelompok minoritas yang rentan.



**Peserta terdiri dari tokoh masyarakat, aktivis, pengurus parpol, dosen dan mahasiswa**

Selain itu, demokrasi pun belum mampu mengelola kemajemukan dalam masyarakat sosial yang sangat heterogen. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh lemahnya implementasi nilai-nilai demokrasi, dan yang paling esensial adalah nilai-nilai kesetaraan. Penerapan demokrasi tanpa implementasi nilai-nilai kesetaraan melahirkan segregasi dalam masyarakat. Intinya, demokrasi belum mampu menjamin penguatan identitas kebangsaan atau keindonesiaan. Terlihat jelas bahwa transformasi masyarakat plural yang tidak tuntas berdampak pada pembentukan konstelasi demokrasi di aras lokal.



**Sesi 1 menampilkan 4 narasumber sekaligus. Meski lama, seluruh peserta tetap semangat**

Buruknya praktek demokrasi di aras lokal antara lain juga disebabkan oleh perilaku elit yang cenderung pragmatis dan oportunistis. Apakah hal ini bermakna bahwa yang bermasalah adalah para elit? Masih perlu pengkajian lebih dalam. Jika masalah demokrasi hanya terletak di tingkat elit sebetulnya tidak terlalu sulit memperbaikinya. Namun, jika masalah tersebut berada di tingkat masyarakat luas, maka tiada lain yang dibutuhkan adalah reformasi pendidikan dalam arti seluas-luasnya. Masyarakat kita perlu pendidikan politik yang sistemik dan pendidikan kewarganegaraan yang dikemas secara holistik mulai dari tingkat PAUD sampai Perguruan Tinggi.



**Kerjasama AIPI dan UKSW semoga terus berlanjut**

Akhirnya, disepakati bahwa akar dari semua permasalahan terkait menurunnya kualitas demokrasi adalah lemahnya kultur demokrasi. Demokrasi yang dikembangkan nyaris tanpa nilai-nilai esensial yang merupakan jiwa demokrasi itu sendiri. Nilai-nilai demokrasi dimaksud tiada lain adalah nilai-nilai universal kemanusiaan, dan yang paling esensial adalah nilai kesetaraan manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat. Bicara tentang kultur, berarti bicara tentang penanaman nilai-nilai. Bicara tentang penanaman nilai, berarti bicara tentang pentingnya pendidikan.

Dalam konteks ini kita masih punya harapan dan optimisme. Untuk itu, direkomendasikan kepada AIPI untuk menggagas seminar berikut dengan tema pokok: pentingnya pendidikan. Yang dimaksud adalah pendidikan nilai-nilai demokrasi agar ke depan, demokrasi Indonesia bukan hanya bertumbuh pada aspek prosedural melainkan juga menitik pada aspek substansial. Hanya dengan demokrasi substantif, kita mampu mewujudkan masyarakat yang maju, damai dan sejahtera.

